

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2007

BERI KEPERCAYAAN BAPEPAM

Panja PGN Tidak Perlu

JAKARTA (SINDO)- Bursa Efek Jakarta (BEJ) berharap kasus keterbukaan informasi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk tetap ditangani Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Penegasan pihak BEJ itu terkait rencana DPR yang akan membentuk panitia kerja (panja) kasus PGN.

"Biarkan Bapepam bekerja dulu karena saat ini Bapepam secara progresif terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus PGN," tegas Direktur BEJ Eddy Sugito di Jakarta, kemarin.

Eddy menjelaskan, secara berkala Bapepam-LK selalu menginformasikan kepada publik mengenai kemajuan proses penyelidikan kasus PGN. "Saya kira tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Bapepam selama ini," ujar dia.

Bila ada yang kurang dari pemeriksaan yang dilakukan Bapepam-LK, DPR bisa memanggil Bapepam-LK untuk mengklarifikasinya. "Jadi, saya kira biarkan Bapepam bekerja dulu," sebut Eddy.

Mengenai dugaan adanya keterlibatan Meneg BUMN Sugiharto dalam kasus PGN dalam bentuk *insider trading*,

"Jadi, saya kira biarkan Bapepam bekerja dulu."

EDDY SUGITO
Direktur BEJ

menurut dia, itu baru sebatas dugaan sehingga perlu diberikan waktu yang cukup kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan. "Bapepam sangat serius dalam menangani hal ini," ungkap dia.

Meski demikian, Eddy menilai pembentukan panja kasus PGN merupakan sesuatu yang positif. Hal itu adalah bentuk perhatian DPR kepada pasar modal. Namun, menurut dia, kasus PGN harus ditangani orang-orang yang ahli. "Saya lihat keahlian Bapepam tidak perlu diragukan lagi," tegas dia.

Sementara itu, pengamat pasar modal Edwin Sinaga menilai langkah DPR yang akan membentuk panja kasus PGN kurang kerjaan. Menurut dia, kasus PGN itu bukan wilayah dan kewenangan DPR, melainkan kewenangan pasar modal. "Ini kan perusahaan publik yang merupakan kewenangan dari otoritas pasar modal," jelas dia.

Menurut Edwin dalam kasus pasar modal yang mempunyai wewenang adalah BEJ dan Bapepam-LK. Kalau DPR ingin mengetahui kasus PGN, mereka tinggal memanggil Menteri Keuangan sebagai atasan Ketua Bapepam-LK. "Atau mereka juga bisa langsung memanggil Ketua Bapepam-LK untuk meminta penjelasan," tambah dia.

Edwin menjelaskan, fungsi DPR dalam hal ini hanyalah sebagai pengawal dan pengawas Bapepam-LK dalam memeriksa kasus ini. Jika DPR membentuk panja, *out put*-nya

58

juga tidak akan jelas karena DPR tidak bisa memberikan sanksi. Yang bisa memberikan sanksi adalah BEJ dan Bapepam-LK.

Mengenai adanya dugaan keterlibatan Meneg BUMN dalam kasus PGN sebagai *insider trading*, menurut Edwin, itu juga wilayah otoritas pasar modal. "Saya pikir akan lebih bijak jika DPR mengambil peran sebagai pengawas, bukan malah membentuk panja," jelas Edwin.

Sebelumnya, Meneg BUMN Sugiharto mengatakan tidak keberatan bila DPR membentuk panja untuk membuktikan apakah dirinya terlibat *insider trading* pada penjualan saham PGN. "Silakan bentuk panja untuk pendalaman saya terlibat atau tidak," kata dia.

Pembentukan panja itu mengemuka saat Sugiharto menanggapi sejumlah pertanyaan anggota DPR yang mensinyalir Meneg BUMN terlibat langsung menggoreng saham PGN yang mengakibatkan saham perusahaan gas itu sempat terpuruk pada 12 Januari 2007.

"Saya mengatakan demi Allah tidak tersurat, tidak tersirat, dan tidak ada niat saya untuk melakukan *moral hazard* dalam divestigasi PGN," tegas Sugiharto.

Dia menambahkan, dirinya siap berbicara kalau memang ada masalah hukum. "Mudah-mudahan Allah mendengar ini. Bismillah, saya akan bicarakan secara rinci," ujar dia.

(rakhmat baihaqi)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2007

KASUS PGN

Pembentukan Panja Tak Diperlukan

JAKARTA (Suara Karya): Manajemen Bursa Efek Jakarta (BEJ) menilai kasus keterbukaan informasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebaiknya tetap ditangani oleh Badan Pengawas Pasar dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Direktur Pencatatan BEJ Eddy Sugito, di Jakarta, Selasa (13/2) mengatakan, Bapepam-LK sebaiknya dibiarkan terlebih dahulu menuntaskan kasus PGN. "Biarkan Bapepam bekerja dulu, karena saat ini Bapepam secara progresif terus melakukan pemeriksaan terhadap kasus

PGN," kata Eddy.

Pernyataan Eddy mengomentari, rencana Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang akan membentuk Panja (panitia kerja) kasus PGN.

Eddy memaparkan secara berkala Bapepam-LK selalu menginformasikan kepada publik mengenai kemajuan proses penyelidikan kasus PGN. "Saya kira tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Bapepam selama ini," ujarnya.

Dikatakan Eddy, jika memang ada yang kurang dari pemeriksaan yang dilakukan Bapepam-LK, DPR

bisa memanggil Bapepam-LK untuk mengklarifikasinya. "Jadi saya kira biarkan Bapepam bekerja dulu," tambahnya.

Mengenai dugaan adanya keterlibatan Meneg BUMN Sugiharto dalam kasus PGN sebagai pelaku *insider trading*, Eddy mengungkapkan, bahwa hal itu baru sebatas dugaan, sehingga perlu diberikan waktu yang cukup kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan.

"Bapepam sangat serius dalam menangani hal ini, kita kasih kesempatan kepada Bapepam untuk melakukan pemeriksaan yang lebih detail," ungkap Eddy.

Eddy sendiri melihat upaya yang dilakukan DPR dengan membentuk Panja kasus PGN merupakan sesuatu yang positif. Hal ini, katanya, adalah bentuk perhatian DPR kepada pasar modal. Namun begitu, menurut dia kasus PGN harus ditangani oleh orang-orang yang ahli. "Saya lihat keahlian Bapepam tidak perlu diragukan lagi," jelasnya.

Sementara itu, pengamat pasar modal Edwin Sinaga menilai langkah DPR

yang membentuk Panja kasus PGN sebagai sesuatu yang kurang kerjaan. Pasalnya, kasus PGN itu bukan wilayah dan kewenangan DPR melainkan kewenangan pasar modal. "Saya lihat DPR tidak punya kerjaan lain. Inikan perusahaan publik yang merupakan kewenangan dari pasar modal," kata Edwin.

Menurut Edwin dalam kasus pasar modal yang mempunyai wewenang adalah BEJ dan Bapepam-LK, kalau DPR ingin mengetahui kasus PGN, mereka tinggal memanggil Menteri Keuangan sebagai atasan ketua Bapepam-LK.

"Atau mereka juga bisa langsung memanggil ketua Bapepam-LK untuk meminta penjelasan," tambahnya.

Edwin menjelaskan fungsi DPR dalam hal ini hanyalah sebagai pengawal dan pengawas Bapepam-LK dalam memeriksa kasus ini.

Jika DPR membentuk Panja maka *out put*-nya juga tidak akan jelas, karena DPR tidak bisa memberikan sanksi. Sedangkan yang bisa memberikan sanksi adalah BEJ dan Bapepam-LK. (Agus)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

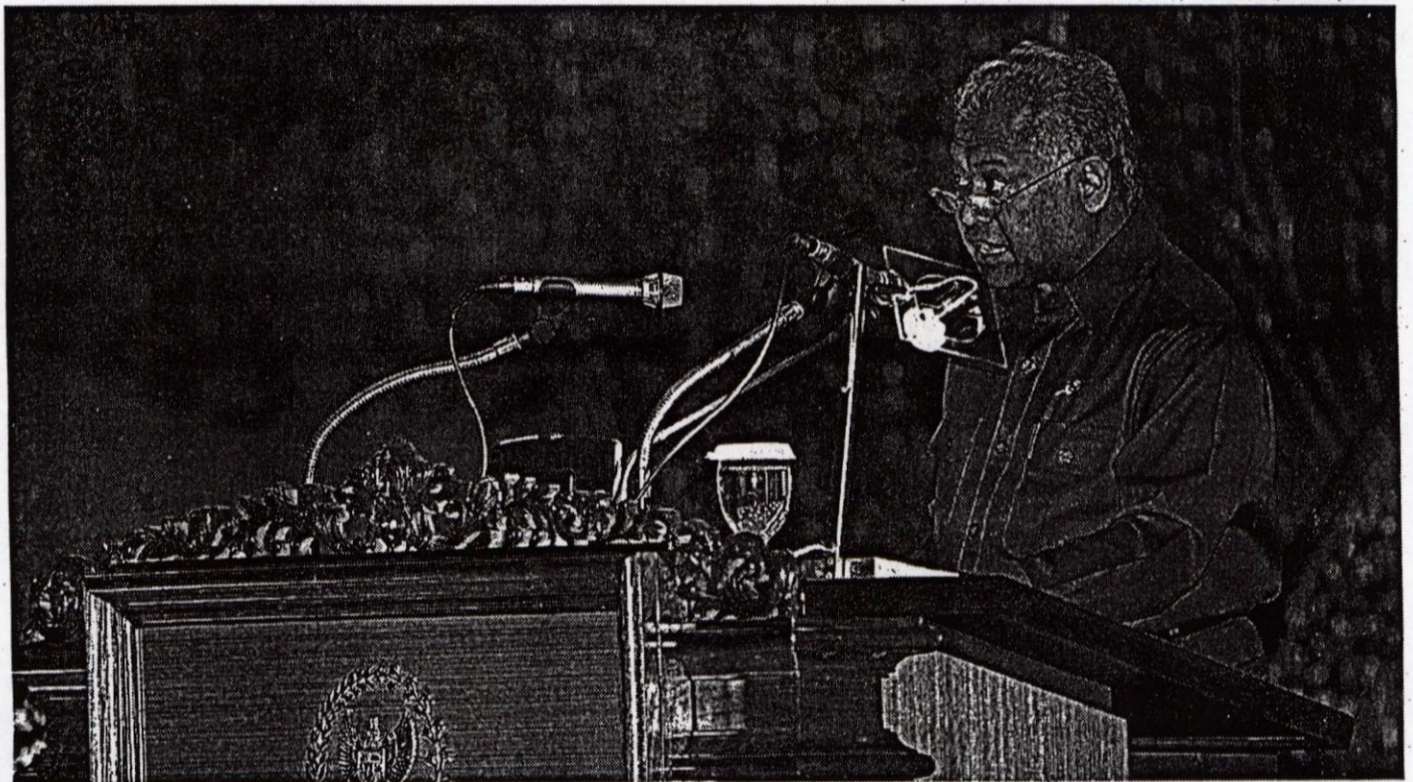
GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2007

PANDU DEWANTARA/ANTARA



RAPAT PARIPURNA: Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro atas nama Pemerintah memberikan tanggapan pada Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang Penetapan Batas Landas Kontinen 2003, di Gedung Nusantara II, DPR-RI, Jakarta, Selasa (13/2).

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 48

TAHUN 2007

Harga ESOP PGN Tetap Rp 10.503 Per Saham

Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Widyatmiko Bapang dalam siaran pers, Selasa (13/2), menyatakan, meskipun harga saham PGN di pasar ada di bawah harga yang telah ditetapkan untuk program pelepasan saham untuk karyawan (*employee stock option program/ESOP*), harganya yang diberikan kepada karyawan tetap Rp 10.503. Sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada 17 November 2006 yang memutuskan mengubah program opsi kepemilikan saham bagi manajemen (*management stocks option program/MSOP*) tahap ketiga menjadi ESOP, saham yang dilepas berjumlah 54.012.338 lembar saham yang akan dibagikan ke karyawan di harga Rp 10.503 per saham. ESOP akan dilaksanakan dalam tiga periode dari 15 Februari 2007 sampai 14 Februari 2008. (*/TAV)

61

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input checked="" type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM								
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15					16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31						
HALAMAN : 3											MARTI 2007

Push for new climate treaty intensifies, hope seen

Jeremy Lovell
Reuters/London

Intensive diplomatic efforts to agree the elements of a framework by the end of the year for a new global climate change treaty are starting to make headway, according to a European official close to the negotiations.

The tone of the debate has changed in the United States and Australia — key nations which rejected the Kyoto Protocol on curbing greenhouse gas emissions — and German Chancellor Angela Merkel has made it a top target of her G-8 presidency this year.

British Prime Minister Tony Blair, with only months left in office and keen to find a positive legacy to offset the damage done by Iraq, is using his weight to help secure a deal.

He meets Merkel in Germany on Tuesday to discuss tactics.

"We need to work for agreement by the G-8 plus five on the elements of a post-Kyoto framework including a global stabilization goal and a cap and trade system, a framework that includes not just the U.S. but also India and China," Blair's spokesman said Monday.

Kyoto only runs to 2012 and — given that it took two years to negotiate and eight more to bring into force — there is an urgency to efforts to extend its life and expand its scope and membership.

Officials from industrialized and developing nations are holding behind-the-scenes talks trying to hammer out elements of the framework ahead of talks in Bali, Indonesia, in December.

"We don't think it is in the bag, but we do think it is possible and we do think the tide is with us. I wouldn't put it any higher than 50/50 — but that is still quite high," said an official with a European government in favor of renewing Kyoto.

Not everyone is convinced given that a meeting of UN

environment ministers in Nairobi last November ended with the minimal expectations that the Bali meeting might only agree a mandate for talks.

"For Bali a mandate to find a replacement for Kyoto is a best case scenario," a UN official said. "The current view is that it will take two years to negotiate a deal and then two years to ratify. Even that will be optimistic if you look at how long it took to ratify Kyoto."

Catherine Pearce, climate change expert at Friends of the Earth, said talks were moving very fast but there were no serious indications of a crucial change of heart in Washington.

"At the moment I am really quite skeptical. I get no sense that (U.S. President George W.) Bush is about to move on this," she said.

Scientists predict that average global temperatures will rise by between 1.8 and 4.0 degrees Celsius this century because of burning fossil fuels, putting millions at risk from rising sea levels, floods, famines and violent weather.

The main reason for Washington and Canberra rejecting Kyoto was that it was not binding on big developing countries.

China, with an economy growing at around 10 percent a year, is developing an array of energy sources from renewables like wind and hydro to nuclear power. But it is also building a coal-fired power station every five days polluting the atmosphere.

The idea is that a replacement Kyoto would bring everyone into the fold but allow less stringent measures for developing nations than industrialized countries.

"We see a package which includes agreement around an emissions stabilization goal, a global cap and trade — which could happen in a variety of ways — measures on technology transfer, adaptation and deforestation," the European official said.

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2007

■ Pemprov Jatim Minta Bantuan Australia Prihatin Musibah Lumpur Lapindo

Surabaya - Pemprov Jawa Timur minta bantuan Australia menerapkan teknologinya untuk mengatasi semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo. Hingga saat ini aliran lumpur menuju laut sulit dikendalikan.

Hal ini diungkapkan Gubernur Jatim Imam Utomo selaku anggota tim pengarah Timnas Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo, saat menerima kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Australia, Tony Mc Rae di gedung negara Graha di Surabaya, Senin (12/2).

Menurut Imam Utomo, jika Australia memiliki teknologi yang mampu mengalirkan lumpur ke laut, diharapkan bisa melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia. "Jika lumpur mengalir liar ke segala arah, dampaknya akan semakin banyak desa yang tenggelam, sehingga kerugian semakin besar," kata Imam Utomo.

Sebelumnya, Tony Mc Rae telah melihat langsung lokasi semburan lumpur di Porong. Dalam kunjungannya tersebut, Mc Rae mengungkapkan keprihatinannya atas musibah luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo. "Betapa banyak rakyat yang harus menderita. Saya turut berduka dan akan memberikan bantuan," kata Mc Rae.

Meskipun demikian, Mc Rae belum mengungkapkan apakah Australia memiliki teknologi yang dimaksud Imam Utomo.

Siapkan BAP

Sementara itu, setelah berkas berita acara pidana (BAP) kasus lumpur Lapindo dikembalikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur beberapa waktu lalu karena dinilai belum

lengkap, Polda Jatim menargetkan dalam pekan ini akan melengkapi berkas tersebut hingga memenuhi P-21 (sempurna).

Menurut Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Jatim, Kombes Polisi Rusli Nasution, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jatim sebelumnya mengembalikan BAP Lapindo karena materi dakwaan dianggap masih belum sempurna, dan JPU meminta penyidik untuk membenahi berita acaranya. Kini kekurangan-kekurangan yang ada dalam materi BAP telah dilengkapi dengan keterangan 16 saksi ahli.

Ia yakin BAP yang menyeret 13 tersangka yang menyebabkan banjir lumpur di Porong ini tidak akan dikembalikan lagi oleh JPU. Sebab semua keterangan yang dimaksudkan JPU sudah dibenahi seperti petunjuk yang diberikan tim JPU. "Semuanya sudah dipenuhi dan dilengkapi," katanya.

Sementara itu, Pjs Kabid Humas Polda Jatim AKBP Pudji Astuti mengatakan, ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada para tersangka sesuai dengan Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 41 dan 42 UU No 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Pasal 94 UU 7/2004 tentang Sumber Daya Air. "Untuk Pasal 187 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur secara sengaja, ancaman hukumannya 12 tahun penjara untuk Ayat 1-c dan 15 tahun penjara untuk Ayat 2-c. Sedangkan Pasal 188 KUHP tentang menyebabkan banjir lumpur karena kesalahan akan diancam lima tahun penjara," tambahnya. (chusnun hadi)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 24

TAHUN 2007

LUMPUR PANAS

Aliran Mendekati Rel KA

SIDOARJO, KOMPAS – Aliran lumpur panas terus merangsek mendekati rel kereta api jurusan Surabaya-Malang/Banyuwangi di ruas Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Berdasarkan pantauan pada Selasa (13/2), aliran lumpur panas masih mengalir liar sesuai kontur endapan lumpur itu sendiri. Sering kali aliran lumpur cenderung mengarah ke barat dan utara yang konturnya lebih rendah.

Jika mengalir ke barat, seperti terpantau kemarin, lumpur mendekati rel kereta api (KA) jurusan Surabaya-Malang/Banyuwangi dan Jalan Raya Porong. Padahal, kolam penampungan di barat pusat semburan sudah penuh. Permukaan lumpur tinggal 10-20 sentimeter dari bibir tanggul.

Rel KA dan Jalan Raya Porong kini menjadi akses utama antara Surabaya dan wilayah selatan serta timur Jawa Timur setelah jalan tol tak berfungsi karena terendam lumpur. Selain mobilitas manusia, kedua akses itu juga digunakan untuk mengirim barang ekspor ke Tanjung Perak dan bahan bakar minyak ke Kota Malang dan sekitarnya.

Lumpur panas masih terus mengalir ke arah barat karena

kanal pengarah yang jebol selebar sekitar 15 meter sejak Kamis pekan lalu belum berhasil ditutup.

Aliran lumpur yang Minggu lalu menjebol tanggul ring 1 dan mengalir ke utara menyebabkan sedikitnya 10 pasang tiang pancang terendam. Rencananya, tiang itu akan dijadikan landasan jaringan pipa transmisi gas Pertamina untuk menggantikan jaringan lama yang meledak pada 22 November 2006.

Bupati Sidoarjo Win Hendrerso menyatakan, rel KA, Jalan Raya Porong, dan tol ruas Porong-Gempol akan dipindah sekitar lima kilometer ke arah barat lokasi lama. Konsepnya menggunakan *frontage road*, yakni tol baru diapit dua jalan arteri nasional (pengganti Jalan Raya Porong). Adapun rel KA ditempatkan pada bagian paling barat.

Dalam konsep itu juga terintegrasi jaringan pipa gas Pertamina dan transmisi listrik PLN. Namun, sejauh ini sumber dana program itu belum jelas.

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo Rudy Novrianto menyatakan, pendanaan program itu masih dibicarakan di masing-masing departemen. (LAS)

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 12

TAHUN 2007

Tanggul Jebol, Lumpur Lapindo Terus Meluap

SIDOARJO — Lumpur panas Lapindo yang keluar dari sumur Banjar Panji (BP) I hingga Selasa (13/2) terus meluap. Pusat semburan lumpur itu tiap hari diperkirakan mengeluarkan lumpur dengan volume 120 ribu meter kubik. Luapan lumpur itu menyebabkan tanggul cincin yang mengelilingi sumur BP I jebol sejak Ahad (11/2) dini pukul 04.00 WIB.

Jebolnya tanggul cincin di pusat semburan lumpur juga disebabkan pergerakan tanah di bawah (*subsidence*) atau tanah ambles. Perkiraan amblesnya tanah mencapai 8 hingga 10 meter dan menyebabkan lumpur bergerak menuju Desa Siring dan Kedungbendo.

Meski begitu, Timnas Penanggulangan Lumpur menyatakan tanggul yang jebol berhasil dikendalikan. Namun kenyataannya, lumpur panas dari pusat semburan hingga kemarin masih meluber ke atas tanggul utama.

Sejumlah alat berat terlihat dikerahkan untuk menutup tanggul yang jebol, terutama yang berada di sebelah barat tanggul. Lumpur tidak hanya meluber di seputar tanggul itu saja, di salah satu titik dinding tanggul utama juga terdapat yang kebororan sehingga air lumpur terus mengalir deras ke arah Desa Siring.

Aliran lumpur panas dari pusat semburan tersebut sebenarnya diupayakan mengalir melewati kanal yang dibuat menuju ke Kali Porong. Namun upaya ini selalu gagal karena lumpur cepat mengendap sehingga menyebabkan aliran lumpur mencari dataran yang lebih rendah, dalam hal ini mengalir ke arah bagian utara yang mengarah ke Desa Siring dan Kedungbendo.

Sebenarnya, sejak Kamis (8/2) tanggul cincin telah retak dan jebol. Bahkan pada Ahad (11/2), kekuatan tanggul kian melemah dan menyebabkan lumpur panas pun semakin luas meluap.

Jebolnya tanggul juga dipicu oleh turunnya hujan deras pada Kamis (8/2) dan Jumat (9/2) lalu. "Karena hujan deras itu, upaya penanggulangan belum dilakukan karena banyak petugas yang tidak berani mengerjakan dengan alasan takut," kata seorang pekerja di kawasan tanggul cincin.

Kepala Unit Design dan Supervisi Timnas Lumpur, Ari Setiadi, saat dikonfirmasi menjelaskan, pihaknya kini berkonsentrasi memperkuat tanggul di desa Siring dan desa Kedungbendo karena aliran lumpur memang bergerak deras menuju ke arah dua desa tersebut.

Gerakan aliran lumpur itu juga

mengalir menuju arah jalan raya Porong. Kondisi desa Siring dan Kedungbendo pun kritis, karena volume lumpur terus bertambah. Begitu juga di tanggul Kedungbendo. Untuk akses jalan di Kedungbendo yang melalui Ketapang kini tidak bisa dilalui karena tanahnya becek dan bila dilewati *dump truck* dipastikan akan ambles. Bahkan lumpur yang ada di pond A di desa Kedungbendo sekarang pun sudah meluber mengalir ke arah Ketapang dan Kalitengah.

Jebolnya tanggul menurut Juru bicara Timnas Penanggulangan Lumpur, Rudi Novrianto, karena kondisi tanggul-tanggul kanal itu dulunya dibuat di atas lumpur. Sehingga posisi tanah urug yang menjadi tanggul itu seringkali mengalami penurunan.

Selain di tanggul utama, kondisi beberapa tanggul di sekitar Jatirejo juga kritis. Lumpur yang mengalir dari kanal yang meluber dan terkumpul di pond Jatirejo telah menjadikan rel kereta api terendam air. Meski begitu, lalu lintas kereta api menuju Malang dan Banyuwangi belum sempat terputus. Hanya, ketika melintas di jalur itu kereta api terpaksa harus berjalan dengan lambat.

■ tok

65

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 2

TAHUN 2007

Tersangka Koba Tin akan Dijerat Tuduhan Korupsi

JAKARTA — Direktur Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Toekarno, menegaskan tiga tersangka dugaan kasus *illegal mining* PT Koba Tin kemungkinan akan dijerat dengan Undang-Undang Korupsi. "Tahap awal kita mendalami adalah pelanggaran Undang-Undang Pertambangan. Tahap selanjutnya, akan kita lihat sejauh mana adanya unsur korupsi-

nya," tegasnya, Selasa (12/2).

Ketiganya akan dijerat oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika perbuatan mereka terbukti merugikan keuangan negara. Sejak Sabtu 10 Februari lalu, ketiga tersangka sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Mabes Polri.

Mereka yang ditahan adalah Dato Mohammad Anwar Sidek (presdir) PT Koba Tin, Direktur Operasional, Nadjib Jafar, dan Direktur Administrasi, Mathias Haryanto. Ketiganya dibawa ke Jakarta oleh Tim Bareskrim Mabes Polri. Sedangkan tersangka lainnya Umar Alwi masih belum memenuhi panggilan Mabes Polri karena berada di Malaysia. ■ ant

66

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
INVESTOR DAILY
KOMPAS
KORAN TEMPO
MEDIA INDONESIA
PIKIRAN RAKYAT
RAKYAT MERDEKA
REPUBLIKA
SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2007

Usulan Pembentukan Badan Penanganan Permanen

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul masa tugas yang akan berakhir 8 Maret 2007, Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, mengusulkan pembentukan badan atau lembaga pengganti yang bersifat permanen. Penanganan yang bersifat *ad hoc* dipandang tidak sebanding dengan persoalan yang dihadapi.

"Masalah itu tidak bisa ditangani organisasi yang bersifat *ad hoc*. Harus organisasi permanen," kata Ketua Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo (PSLS), Basuki Hadimoeljono, di Jakarta, Selasa (13/2).

Badan permanen yang dimaksud, seperti Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascagempa Yogyakarta, bukan BRR Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang merupakan badan pelaksana. Pada BRR Yogyakarta, pemerintah daerah sebagai pelaksana lapangan berada di bawah arahan dan pendampingan teknis pemerintah pusat.

Dikatakan Basuki, pihaknya sudah menyampaikan usulan itu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR untuk membentuk tim permanen dan rencana anggarannya.

Tiga hal yang dinilai harus diperhatikan dalam penanganan semburan lumpur panas Lapindo Brantas Inc yaitu penanganan semburan yang diperkirakan berusia puluhan tahun, dampak sosial, dan dampak ekonomi yang kian meluas. "Mungkin soal in-



Basuki Hadimoeljono

frastruktur dapat diambil alih negara. Kalau tetap tanggungan Lapindo, maka hal itu harus menjadi urusan negara dengan Lapindo, jangan warga dengan Lapindo," kata dia.

Usulan serupa pernah muncul dalam diskusi di Surabaya. Saat itu Gubernur Jatim Imam Utomo mengatakan, pembentukan badan organik sangat mendesak.

Ia berharap pemerintah pusat yang mengambil alih, termasuk soal pembiayaannya. Di Jatim saja, kerugian ekonomi mencapai Rp 0,5 triliun per harinya dengan jumlah pengungsi 12.000 warga.

Desakan menguat mengingat kontribusi pajak dari Jatim ke pemerintah pusat mencapai Rp 52 triliun per tahun, dengan jumlah yang dikembalikan Rp 16 triliun hingga Rp 18 triliun. Sejak bekerja di lapangan, Timnas PSLS di antaranya membuat tanggul penahan lumpur, melapisinya dengan bahan khusus penahan serapan, kanal pembuang, dan memasang pompa pembuang. (INA/GSA)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 14

TAHUN 2007

Hari Ini, Program MSOP PGN Tuntas

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) telah mengeksekusi sekitar 53,93 juta lembar saham *management stock option program* (MSOP) tahap kedua. Dengan demikian, jumlah saham PGN tercatat di bursa menjadi 4,54 miliar unit saham.

Sekretaris Perusahaan PGN Widyatmiko Bapang menjelaskan, MSOP tahap kedua dilakukan sejak 15 Februari 2006 sampai 14 Februari 2007. Perseroan mengalokasikan saham MSOP sebesar 54,01 juta lembar. "Masih ada sisa saham yang belum dieksekusi sebesar 82.838 lembar," ujarnya dalam siaran pers yang diterima *Investor Daily* di Jakarta, Selasa (13/2).

Menurut dia, BUMN distributor gas itu sedang menyiapkan program *employee stock option programe* (ESOP) dengan saham sebesar 54,01 juta lembar. Berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 17 November 2006, harga saham ESOP mencapai Rp 10.503 per lembar.

Meskipun harga saham PGN berada di bawah harga saham ESOP, menurut dia, harga ESOP tetap pada harga Rp 10.503 per lembar. Sedangkan pelaksanaan ESOP dilakukan dalam tiga periode, yakni 15 Februari - 14 Maret 2007, 15 Juli - 14 Agustus 2007, dan 15 Januari - 14 Februari 2008. Hal tersebut sesuai dengan keputusan RUPSLB tahun lalu. (hut)

68

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 64

TAHUN 2007

Medco Energi Akan Lepas Sebagian Saham Anak Usaha

Jumlah saham yang akan dilego 30-40 persen.

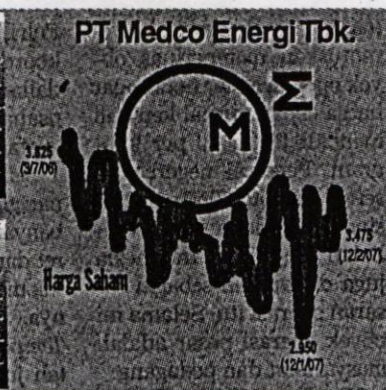
JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. berencana membentuk anak perusahaan baru pada akhir tahun ini. Perusahaan baru tersebut akan menampung seluruh aset perseroan yang tersebar di luar negeri.

Menurut Presiden Direktur Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro, setelah terbentuk nanti, perseroan berencana melepas sebagian saham perusahaan tersebut melalui bursa. "Pelepasan saham itu akan dilakukan melalui penawaran umum saham perdana (IPO)," ujarnya kepada *Tempo* di Jakarta akhir pekan lalu.

Hilmi belum bisa memastikan berapa saham yang akan dilepas dan target dana yang bisa diraup dari proses tersebut. Namun, menurut sumber *Tempo*, jumlah saham yang dijual itu sebesar 30-40 persen. "Belum bisa disebutkan sekarang," ujar Hilmi saat diminta konfirmasi soal itu.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, perseroan masih terus melakukan berbagai langkah persiapan pembentukan dan pelepasan saham perusahaan itu. Kendati demikian, "Diharapkan semua proses bisa ram-

Kinerja Keuangan (Juta US\$)		
	Sep. 2006	Sep. 2005
Aset	724	1.424,3
Ekuitas	344	324,3
Utang	380	1.100
Pemegang Saham (persen)		
Denaco Energi Resources Pte. Ltd.	33,42	
Amari Energi Resources Pte. Ltd.	17,28	
PT Medco Dana	0,00	
PT Medco Energi	49,30	



Sumber: BEJ Medco/Viva (PDAT)

pung akhir tahun ini," ujar Hilmi.

Aksi korporasi tersebut, menurut Hilmi, bertujuan mengoptimalkan aset perseroan yang ada di luar negeri. Tujuan lainnya, aktivitas bisnis perusahaan baru yang memiliki risiko lebih tinggi tidak akan mengganggu arus kas perseroan.

Kiprah perusahaan minyak dan gas yang didirikan Arifin Panigoro tersebut masuk ranah bisnis internasional mulai pada 2004 dengan mengakuisisi Novus Petroleum Limited. Selanjutnya Medco Energi melakukan ekspansi ke sejumlah negara di kawasan Timur Tengah, seperti Libya dan Oman.

Analisis sektor pertambangan dari PT Trimegah Sekuritas, Sabastian Tobing, menilai aksi korporasi Med-

co Energi akan berdampak positif terhadap pergerakan saham perseroan di bursa. Dia menyarankan, pencatatan saham tersebut idealnya dilakukan di bursa luar negeri karena, "Toh, aset perusahaan tersebut juga berada di luar negeri," katanya.

Sabastian juga mengungkapkan Medco Energi seharusnya mempersiapkan opsi penjualan sebagian saham unit usaha baru ke partner strategis yang sudah berpengalaman dalam kegiatan eksplorasi dan produksi.

Pemegang saham akan lebih diuntungkan jika yang membeli saham tersebut sudah berpengalaman di bidang pertambangan minyak. "Karena diharapkan dapat memberi kontribusi dalam eksplorasi," katanya. ● DESY PAKPAHAN